

# Minta Sertifikat Hak Milik dan Bebas UWTO

LUBUKBAJA (BP) - Rumpun Khazanah Warisan Batam (RKWB) meminta lahan di Kampung Tua bersertifikat hak milik, serta dibebaskan dari Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO). Sebab, lahan di kampung tua di bawah pengelolaan Pemerintah Kota (Pemko) Batam.

"Jelas apa yang kami perjuangkan, yakni sertifikat hak milik dan dibebaskan dari UWTO. Kami minta (lahan kampung tua) dikelurakan dari HPL BP Batam," kata Sekretaris RKWB Raja M Amin saat konferensi pers di Batamcentre, Selasa (6/3) siang.

Ia menilai kampung tua di Batam berhak atas status setara secara hukum dan administrasi dengan daerah lain di Indonesia. Seiring hal ini, pihaknya mendukung peralihan Batam dari *Free Trade Zone* (FTZ) ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

# Minta Sertifikat Hak Milik dan Bebas UWTO

*Sambungan dari hal 9*

Dimana dalam KEK ini akan ada pemisahan yang jelas kewenangan antara BP Batam dan Pemko Batam.

Merujuk pada pemaparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Raja menyampaikan bahwa dalam kawasan KEK akan dikeloal BP Batam dan di pemukiman merupakan kewenangan Pemko Batam.

"Nah, karena kampung tua adalah pemukiman akan di bawah Pemko Batam. Seperti yang disampaikan Wali Kota Batam Muhamamd Rudi, kita berharap pemukiman di Batam tak ada lagi," ucapnya.

Ketua RKWB Machmur Ismail menambahkan bahwa saat ini baru lima titik kampung tua yang sudah selesai diverifikasi dari 37 titik kampung tua. Dimana, awalnya 33 kampung tua menjadi 37 kampung tua. "Itu berkat kebersamaan kita dengan Pemko, hingga dimasukkan tambahan kampung tua yang terlupakan," bebernya.

Namun seiring verifikasi ini, kampung tua belum mendapat kepastian legalitas yang diharapkan RKWB. Menurutnya sudah saatnya BP Batam dan Pemko Batam mendengarkan harapan kampung tua di Batam. "Sertifikat gratis diberikan untuk kaveling. Semen-

tara kami dari kampung tua yang sudah lama meminta sertifikat, tidak diberikan," ungkap Machmur.

Setelah mendapat legalitas, RKWB mendorong Pemko Batam mengembangkan kampung tua sesuai potensinya masing-masing, dengan menimbang peningkatkan sarana dan prasarana pemukiman serta pengembangan ekonomi berbasis masyarakat. "Baik yang memiliki pariwisata, kebudayaan maupun lainnya," imbuhnya.

Sementara pengurus RKWB lainnya, Abdul Kadir meminta agar BP Batam merealisasikan janjinya untuk segera melakukan pemutihan kam-

pung tua. "Kami minta agar alokasi kampung tua ke pengusaha dihentikan. Kami minta untuk program sebelumnya untuk legalitas kampung tua dilanjutkan. Tim yang sudah dibentuk diaktifkan, terlepas anggota diganti," tegas Kadir.

Di tempat terpisah, Kepala Dinas Pertanahan Batam Aspawi mengatakan, sebenarnya pengukuran titik-titik kampung tua sudah selesai. Hanya saja, luas kampung tua diakui belum ada titik temu. "Pengukuran sudah selesai di 33 titik. Tapi belum disepakati luasan-nya. Masyarakat dan BP Batam belum sepakat luas kampung tua," pungkasnya. (adi)

# Tambang Pasir Rambah Kawasan Bandara

## Sembunyi-sembunyi, Polisi Diminta Bertindak

GALIH ADI SAPUTRO, Nongsa

**AKTIVITAS** tambang pasir ilegal ternyata tak hanya di kawasan Panglong, Batubesar. Penambangan serupa juga dapat dijumpai di Kabil yang kini merambah ke area Bandara Internasional Hang Nadim Batam.

"Area steril Bandara Hang Nadim Batam itu luasnya 1.762 hektare. Kampung Jabi masuk Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) yang wajib steril dari aktivitas penambangan pasir ilegal dan kegiatan di luar kepentingan keselamatan bandara," ujar Suwarso, Selasa (6/3).

Kenyataannya, lanjut Suwarso, para oknum pemain pasir atau penambang pasir ilegal tersebut masih saja nekat menambang pasir di area KKOP Bandara Hang Nadim di ka-

wasan Kabil.

"Ada beberapa titik yang saya lihat. Memang sudah tak terlalu vulgar dalam menambang pasirnya, tapi para oknum ini masih sering curi-curi dalam menambang pasir. Ini yang harus kami hentikan dan kami antisipasi," terang Suwarso.

Sebab, lanjut Suwarso, tambang pasir di dekat bandara akan berdampak pada kerusakan landasan pacu pesawat atau *runway*.

"Memang dampaknya tidak langsung, tapi kalau tiap hari ditambang dalam jangka panjang hal itu akan berpengaruh pada tergerusnya tanah di area bandara yang berdampak pada kerusakan landasan pacu." Sementara itu, Kepala Direktorat Pengamanan BP Batam Suherman menegaskan bahwa pihaknya sudah berkali-kali merazia dan menertib-

kan aktivitas penambangan pasir di area KKOP Bandara Hang Nadim Batam.

"Kami bahkan sudah sering menangkap dan menyita mesin pengisap pasir milik para pemain pasir yang nekat menambang di area KKOP Bandara Hang Nadim," ujar dia.

Saat ini, beberapa titik tambang pasir yang masuk area KKKOP sudah banyak yang tutup atau ditinggalkan. "Tapi tak tahu ya kalau mereka melakukan penambangan secara sembunyi-sembunyi dan curi-curi," ujarnya.

Pihaknya akan mengintensifkan pengawasan lagi di area KKOP Bandara Hang Nadim Batam, agar tetap steril dari penambangan pasir.

**PPNS Pemko Batam Tak Bernyali**  
Sementara anggota Komisi I

DPRD Kepri yang membidangi hukum, Ruslan Kasbulatov mempertanyakan keseriusan Pemko Batam menertibkan aktivitas penambangan pasir di Batam yang telah berlangsung lama.

"Dampak kerusakan lingkungannya itu kan sudah parah, yang dirugikan adalah Batam, masyarakatnya, tapi kenapa Pemko Batam dalam hal ini Wali Kota Batam diam saja. PPNS pun tak bernyali," ujar anggota legislatif dari PDIP ini.

Ruslan curiga, baik Pemko Batam maupun PPNS-nya, dari awal tak punya nyali berhadapan dengan para pemain pasir di Batam. Pasalnya, kata dia, sudah jelas aktivitas itu ilegal, tapi tetap saja didiamkan tanpa ada aksi nyata.

"Saya juga curiga, jangan-jangan hasil dari tambang pasir itu, pundi-pundinya juga



E. CECEP MULYANA, BATAM POS  
**Suwarso**

dinikmati dan mengalir ke seluruh pejabat di Batam," tuding Ruslan.

Menurut dia, jika PPNS-nya tak bernyali menertibkan tambang pasir, Polda Kepri yang harus turun tangan. Kegiatan tambang pasir darat di Batam tak satupun yang legal, semua ilegal sehingga sudah selayaknya ditindak tegas. Apalagi jika sudah masuk area objek vital seperti area Bandara Hang Nadim.

"Sudah jelas ilegal, tunggu apa lagi, kita tak bisa berharap banyak dari PPNS Pemko Batam yang tak punya nyali itu," terang mantan Wakil Ketua DPRD Batam ini.\*\*\*